

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perubahan kebijakan hak asasi manusia (HAM) LGBT terjadi di Vietnam dalam rentang waktu 2013 hingga 2022. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan pendekatan sintesis antara teori perubahan kebijakan model intermestik dan ACF. Pendekatan ini memungkinkan analisis atas dinamika kebijakan yang tidak hanya melibatkan tekanan eksternal dari aktor internasional, tetapi juga konflik dan pembelajaran nilai di dalam subsistem kebijakan domestik Vietnam. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa perubahan kebijakan HAM LGBT di Vietnam berlangsung secara gradual dan tidak melalui konflik terbuka.

Perubahan ini dimulai dari penghapusan larangan pernikahan sesama jenis dalam Undang-Undang Perkawinan dan Keluarga pada tahun 2014, hingga pada 2022 Kementerian Kesehatan secara resmi menyatakan bahwa homoseksualitas bukanlah penyakit dan melarang praktik terapi konversi di fasilitas kesehatan. Dalam kerangka model intermestik, perubahan ini dapat dijelaskan sebagai hasil dari relasi antara aktor domestik seperti iSEE dan ICS Center dengan aktor internasional seperti UNDP, USAID, dan negara donor. Relasi ini menghasilkan tekanan normatif dan teknokratik yang memperkuat posisi advokasi di dalam negeri. Sementara itu, ACF menjelaskan bagaimana advokasi proLGBT membentuk koalisi nilai yang berhadapan dengan koalisi konservatif negara. Melalui proses policyoriented



learning, perubahan kebijakan tidak lahir dari konfrontasi, melainkan melalui pembelajaran dan adaptasi nilai oleh aktoraktor kunci di institusi negara

Dengan demikian, sintesis kedua teori tersebut menunjukkan bahwa perubahan kebijakan LGBT di Vietnam bukanlah hasil dari tekanan sepihak atau perubahan elite, tetapi merupakan proses yang kompleks, berlapis, dan berlangsung melalui dinamika koalisi, jejaring transnasional, dan negosiasi nilai..

5.2 Rekomendasi Penelitian Lanjutan

Untuk penelitian selanjutnya, bisa dilakukan untuk memperdalam studi melalui pendekatan lapangan seperti wawancara dengan aktor kebijakan, aktivis, dan komunitas LGBT itu sendiri untuk menangkap dinamika aktor secara lebih detail. Penelitian juga dapat memperluas fokus dengan membandingkan Vietnam dengan negara Asia Tenggara lainnya untuk mengidentifikasi pola regional dalam advokasi HAM LGBT di kawasan dengan rezim otoriter atau semitoriter. Selain itu, akan sangat bermanfaat untuk mengkaji peran media digital, gerakan anak muda, dan kampanye berbasis platform online seperti "I Do" dalam membentuk opini publik dan memengaruhi kebijakan, karena ranah ini terbukti menjadi ruang kontestasi nilai yang signifikan dalam kasus Vietnam.

